

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada tahun 2019 hubungan antara Jepang dan Korea Selatan kembali memanas akibat adanya atensi masa lalu yang kembali diminta pertanggung jawabannya oleh Mahkamah Agung Korea Selatan, dengan menuntut ganti rugi untuk para korban kerja paksa kepada beberapa perusahaan asal Jepang seperti Nippon Steel dan Mitsubshi Heavy ketika masa Jepang menduduki Semenanjung Korea. Jepang menolak untuk memberikan ganti rugi tersebut karena pemberian kompensasi tersebut telah diselesaikan pada perjanjian 1965. Akibat hal tersebut pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan dalam pembatasan ekspor bahan baku semikonduktor terkhusus dalam tiga bahan seperti *hydrogen fluoride*, *fluorinated polymide*, dan *photoresist*. Hal tersebut, kemudian berubah menjadi perang dagang antara Jepang dan Korea Selatan.

Dengan adanya perang dagang tersebut, masyarakat Korea Selatan beranggapan bahwa Jepang adalah negara yang tidak bertanggung jawab dengan kesalahan masa lalu. Sehingga, masyarakat Korea Selatan beramai-ramai memboikot produk-produk yang berasal dari Jepang seperti, otomotif, produk konsumsi, dan lainnya. Hingga, menyebabkan Jepang mengalami kerugian dalam ekspor Jepang yang cukup signifikan mencapai angka JYP46,6 miliar ke Korea Selatan dalam waktu satu tahun, dan hal tersebut juga berdampak pada PDB Jepang saat itu. Dengan kerugian yang diderita oleh Jepang, tidak membuat pemerintah Jepang menghapus kebijakan pembatasan ekspor tersebut. Maka dari itu, dalam

penelitian ini penulis akan menganalisis kepentingan Jepang dalam perang dagang antara Jepang dan Korea Selatan.

Hal tersebut kemudian akan dianalisis menggunakan kerangka konsep dari Charles Chong-Han Wu yaitu *national interest* atau kepentingan nasional. Dalam konsep tersebut Wu menjelaskan ada tiga kepentingan yang dapat dianalisis. Tiga kepentingan tersebut adalah kepentingan ekonomi (*economy interest*), kepentingan keamanan (*security interest*), kepentingan komunitas (*community interest*). Dalam setiap kepentingan tersebut terdapat tiga indikator yang dapat dianalisis lebih lanjut. Dalam kepentingan ekonomi, tiga subkomponen yang dapat dianalisis adalah perdagangan, keterbukaan pasar, dan investasi asing langsung. Dalam kepentingan keamanan, tiga subkomponennya adalah aliansi, kapabilitas, dan nuklir. Dalam kepentingan komunitas, tiga subkomponen yang dapat dianalisis adalah organisasi antar pemerintah, *development*, dan demokrasi.

Kepentingan Jepang dalam aspek *economic*, perdagangan, keterbukaan, dan investasi asing langsung adalah kunci untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Jepang di tengah persaingan global yang ketat. Aspek *security*, aliansi dan kemampuan pertahanan memberikan stabilitas yang diperlukan untuk mendukung kebijakan ekonomi. Pada aspek *community*, keterlibatan dalam organisasi internasional dan nilai-nilai demokrasi membantu menciptakan lingkungan perdagangan yang adil dan stabil. Perang dagang Jepang-Korea Selatan menunjukkan bagaimana ketiga aspek ekonomi, keamanan, dan komunitas, saling terkait dan berkontribusi pada strategi global Jepang. Seluruhan kepentingan tersebut menunjukkan bahwa Jepang memahami pentingnya integrasi antara kepentingan ekonomi, keamanan, dan komunitas yang saling berkaitan dalam menghadapi tantangan global, termasuk

dalam perang dagang dengan Korea Selatan. Dengan mempertahankan keseimbangan antara ketiga aspek ini, Jepang dapat terus memposisikan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik yang berpengaruh di kawasan Asia dan di dunia, serta dapat menjaga stabilitas keamanan global.

5.2 Saran

Berdasarkan pada penelitian ini, penulis menyarankan kepada penelitian selanjutnya agar lebih mengembangkan penelitian serupa dengan lebih menguraikan topik pembahasan mengenai kepentingan Jepang dalam perang dagang dengan Korea Selatan pada tingkat yang lebih spesifik. Penulis beranggapan bahwa dalam penelitian ini masih terdapat banyak fakta dan data yang belum dibahas, sehingga dengan dilakukan penelitian berikutnya akan dapat menyempurnakan penelitian tentang kepentingan Jepang dalam perang dagang dengan Korea Selatan ini. Harapannya penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan dalam ilmu Hubungan Internasional yang akan membantu penelitian-penelitian berikutnya.

